ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

(Studi Kasus Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN Mks)

*Analysis Of Free Decision On The Implementation Of Narcotics Criminal Actions In Makassar Court Court
(Case Study of Decision Number 1434 / Pid.Sus / 2018 / PN Mks)*

Andi Ilham Anwar¹, Marwan Mas², Abdul Salam Siku³

¹Pengadilan Negeri Kelas 1 Makassar

^{2,3}Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: 46andiilham@gmail.com

Diterima: 01 April 2020/Disetujui: 05 Juni 2020

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana narkotika, mengetahui pertimbangan hakim tentang hal – hal yang memberikan penjatuhan Putusan Bebas Pasal 191 KUHP Ayat (1) terhadap terdakwa tindak pidana narkotika, menganalisis dan mengamati fakta – fakta pada persidangan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri di Kota Makassar. Hasil Putusan 1434/Pid.Sus/2018/PN Mks. Jaksa Penuntut umum menggunakan dakwaan alternative Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1), dimana unsur dan pasal saling berkesesuaian, namun berdasarkan fakta persidangan dan pengakuan saksi-saksi khususnya saksi *a de charger* dimana pasal yang didakwakan memuat unsur subjektif yaitu setiap orang, namun fakta antara apa yang didakwakan unsur setiap orang (terdakwa) tidak memiliki hubungan dari pengembangan atas kasus narkotika, sehingga atas keterangan tersebut majelis berkesimpulan bahwa unsur setiap orang pada pasal ini tidak terbukti, oleh sebab itu sudah sepatutnya terdakwa dibebaskan dari dakwaan, mengingat ketentuan pasal 191 KUHP ayat (1) dan ketentuan Hukum lainnya yang saling berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Proses persidangan berjalan tanpa mengesampingkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman pada kasus tindak pidana narkotika.

Kata Kunci : Hakim, Putusan Bebas, Tindak Pidana Narkotika

ABSTRACT

This study aims to determine the process of applying the material criminal law in narcotics crime, to know the judge's considerations on matters that provide the ruling on Article 191 of the Criminal Code Free Verdict Paragraph (1) against narcotics criminal defendants, to analyze and observe facts at the trial. This research was conducted in the District Court Office in Makassar City. From this study, the authors get the verdict of 1434 / Pid.Sus / 2018 / PN Mks. The Public Prosecutor uses the alternative indictment of Article 114 paragraph (2) Jo Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics or Article 112 paragraph (2) Jo Article 132 paragraph (1), where the elements and articles are compatible, but based on the facts of the trial and the testimony of witnesses especially witness a de charger where the article charged contains a subjective element that is each person, but the fact between what is charged by the element of each person (the defendant) has no relationship with the development of narcotics cases, so based on the information the panel of judges concluded that the element of each person in this article was not proven, therefore the defendant should have been acquitted of the indictment, bearing in mind the provisions of article 191 of the Criminal Code paragraph (1) and other interrelated legal provisions. The results of this study indicate that the implementation of the Trial Process proceeded without prejudice to the implementation of judicial authority in narcotics crime cases.

Keywords: Judge, Recidive, Free Verdict, Narcotics Crime

1. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan Narkotika dan bahan adiktif lain (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menempati masalah serius dan telah mencapai masalah keadaan yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah

Nasional. Korban penyalahgunaan Narkotika telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, dan jenis kelamin. Tidak hanya perkotaan tetapi juga sudah merambah kepedesaan menjadi sasaran dari peredaran Narkotika dan juga hingga melampaui

batasan negara yang akibatnya dapat merugikan perorangan, masyarakat, bahkan negara, khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya juga dapat melemahkan sistem ketahanan nasional. Penyalahgunaan narkoba bukanlah suatu kejadian sederhana yang bersifat mandiri, melainkan merupakan akibat dari berbagai faktor yang secara kebetulan berjalan menjadi suatu fenomena yang sangat merugikan bagi semua pihak yang terkait. (Dwi Yanni Lukitaningsih., Op.cit. ; 30)

Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang bertujuan sebagaimana pada Pasal 4 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu bertujuan (a) Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (b) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; (c) Memberantas peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika; dan (d.) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika”.

Kajian kriminologi perdagangan Narkotika dan sejenisnya seperti halnya, perjudian serta prostitusi memang ada yang menggolongkan sebagai “kejahatan tanpa korban” atau “*victimless crik*”. Dinamakan demikian karena berdasarkan sifat dari kejahatan tersebut, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak yang lain. Berbeda dengan jenis kejahatan lainnya seperti halnya pembunuhan dan pemerkosaan yang mana dari adanya kejahatan tersebut yaitu timbulnya korban atau kerugian bagi pihak yang lainnya (Taufik, 2003:).

Perlakuan penanggulangan kejahatan, maka para aparat penegak hukum lebih cepat menangani kasus-kasus kejahatan yang menimbulkan korban. Seperti halnya pembunuhan dan pemerkosaan yang langsung menimbulkan reaksi baik dari korban maupun masyarakat. Dan reaksi dari masyarakat tampaknya sangat cepat diselesaikan oleh penegak hukum, dibandingkan dengan kasus-kasus kejahatan tanpa korban. Tindak pidana Narkotika saat ini telah menjadi permasalahan yang sangat kompleks dan perlu ditanggapi serius oleh masyarakat dunia khususnya Indonesia.

Dalam kasus penjatuhannya putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana narkotika dimana terdakwa tersebut telah terbukti secara sah memiliki atau menguasai Narkotika tetapi oleh hakim terdakwa tersebut diputus bebas. Namun selama ini pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku Narkotika dirasa kurang sesuai dengan Undang-Undang yang telah diterapkan dan berlaku saat ini. Karena masih sering banyak terjadi penjatuhannya putusan hakim yang tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku Narkotika tersebut.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut agar hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hal ini perlu dipertimbangkan karena keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan saksi atau orang-orang dari lingkungannya, dokter ahli dan sebagainya.

Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya. Dalam menyelenggarakan peradilan hakim mempunyai tugas menegakkan hukum yang mempunyai pengertian bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dengan kata lain hakim harus selalu menegakkan hukum tanpa harus melanggar hukum itu sendiri.

Dalam kehidupan bermasyarakat telah dikenal hukum positif yaitu hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Peraturan hukum pidana merupakan peraturan yang harus ditaati oleh setiap orang. Seseorang yang melanggar Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah sepatutnya untuk diadili. Seorang terdakwa misalnya yang telah kedatangan membawa sebuah paket dan ternyata dalamnya berisi sabu-sabu telah ditangkap oleh petugas polisi. Ternyata paket yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukanlah miliknya akan tetapi milik temannya. Terdakwa yang semula hanya ingin mengambil paket tersebut karena dimintai tolong malah seolah-olah dia dijebak oleh temannya tersebut. Terdakwa pun langsung dibawa polisi tanpa adanya izin. Berdasar pertimbangan Majelis Hakim, Terdakwa ini diputusbebas karena pasal yang di dakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti.

Pada dasarnya peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Sehingga ketika ada kasus narkotika ini tidak jarang yang diputus bebas oleh Pengadilan, putusan bebas apabila kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas dan dengan adanya putusan bebas tersebut tentunya majelis hakim melihat dan menimbang fakta-fakta persidangan. Perlu diketahui penangkapan terhadap pengedar narkoba itu tidaklah mudah, sehingga kemungkinan dapat terjadi adanya salah tangkap, dan jika itu terjadi pihak korban salah tangkap tersebut dapat mengajukan suatu ganti rugi dan rehabilitasi.

Pengaturan mengenai penjatuhannya putusan bebas dalam tindak pidana narkotika dikaji secara terpisah, yaitu dari KUHP yang mengatur mengenai penjatuhannya putusan bebas yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP dan dari undang-undang narkotika, yang mana pengaturan mengenai tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, yang kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berlaku sampai saat ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini pengaturan mengenai tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Hakim menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana narkotika adalah apabila tidak

memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan apabila tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Kebijakan hukum bagi terdakwa yang telah dijatuhi putusan bebas adalah berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (pemulihan nama baik). Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui dan mendeskripsikan aturan-aturan hukum dan Fakta-fakta persidangan dan mengetahui dan mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada kejahatan penyalahgunaan narkoba di Tingkat Pengadilan Negeri Makassar.

2. METODE

Lokasi penelitian yakni di Pengadilan Negeri Makassar. Pemilihan lokasi tersebut telah dipertimbangkan secara objektif untuk mendapatkan data yang akurat dan lengkap sehingga diharapkan menghasilkan sebuah penelitian ilmiah yang berkualitas sangat baik.

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung saat penelitian seperti, data dari hasil wawancara dengan anggota Panitera, Majelis Hakim di Kantor Pengadilan Negeri Makassar yang telah ditentukan, serta pihak-pihak yang terkait.
- b) Data Sekunder, yaitu data yang sudah ada dan tersedia, baik yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Makassar, maupun data dari lembaga lain yang dinilai perlu dan berkaitan dengan penelitian.

Cara untuk mengumpulkan data, peneliti lakukan dengan teknik sebagai berikut:

- a) Teknik Wawancara (*interview*), yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dan mendalam dengan responden/narasumber yang telah ditentukan, dalam hal ini menggunakan teknik wawancara mendalam.
- b) Teknik Kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan normatif dari beberapa data-data dan dokumen yang telah ada, peraturan perundang-undangan terkait, serta penelaahan beberapa literatur yang relevan penelitian ini.

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang teliti

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hakim Dalam Memutus Perkara (Studi Kasus Putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN Mks)

- a) *Dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan*

Ius Curia Novit/Curia Novit Jus berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar Bapak Agus Rusianto, mengatakan bahwa hakim sebagai organ pengadilan artinya dianggap mampu memahami hukum, oleh karena itu harus memberi pelayanan kepada setiap pencari keadilan yang memohon keadilan kepadanya. Apabila hakim dalam memberi pelayanan menyelesaikan sengketa, tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasar hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara.

- b) *Mengadili dengan Mencermati Fakta Persidangan*

Putusan Pengadilan merupakan output dari proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim mengambil keputusan. Adapun pengambilan setiap putusan harus berdasarkan surat dakwaan, requisitoir penuntut umum, kemudian pada segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan. Selain itu, pengambilan putusan harus diambil dengan melalui musyawarah jika hakim terdiri atas hakim majelis.

Hasil wawancara dengan salah seorang Hakim Tingkat Pertama Bapak Darwis, mengatakan bahwa satu hal yang harus diingat ialah dalam musyawarah pengambilan putusan tersebut hakim tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan dalam surat penyerahan perkara yang menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ketentuan Pasal 182 ayat (5) KUHAP kemudian mengatur bahwa dalam musyawarah ini, hakim ketua majelis akan mengajukan pertanyaan mulai dari hakim yang muda sampai hakim yang tertua, sedangkan hakim ketua terakhir sekali memberikan pendapatnya, dimana semua pendapat harus disertai pertimbangan dan alasan-alasannya.

Selanjutnya ditentukan bahwa semua hasil musyawarah harus didasarkan permufakatan yang bulat, terkecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai, maka ditempuh dua cara yaitu : (1) Putusan diambil dengan suara terbanyak, dan (2) Jika tidak diperoleh suara terbanyak, diambil pendapat hakim menguntungkan terdakwa. Selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar Bapak Darwis menanggapi bahwa cara tersebut tentunya sangat menguntungkan terdakwa karena jika di dalam musyawarah tidak ada kesepakatan pendapat dimana seorang hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sehingga harus dijatuhi pidana penjara sementara hakim lainnya berpendapat beda, yakni bahwa terdakwa justru tidak terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan sehingga terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan hukum, sedangkan seorang hakim lainnya tidak memberikan pendapatnya alias abstain, dan jika terjadi demikian, putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa pastilah putusan berupa pembebasan dari tuduhan. Ketentuan yang demikian itu diakui mempunyai kebaikan terutama bagi terdakwa tetapi akan dikhawatirkan dapat terjadi penyalahgunaan pasal tersebut, dimana terdakwa dapat mendekati salah seorang hakim dengan janji-janji yang menggiurkan agar dapat memberikan pendapat yang

menguntungkan di dalam musyawarah pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah dengan berdasar pertimbangan yang diperoleh setelah mencermati semua alat bukti dan barang bukti yang muncul di persidangan, dimana hasil pencermatannya itu dituangkan dalam bentuk pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

c) *Bertanggung Jawab Atas Penetapan dan Putusan yang dibuatnya*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus Rusiyanto, beliau mengatakan bahwa salah satu tugas pengadilan adalah menyelesaikan masalah yang diajukan oleh masyarakat, dan sebagai pemutus hasilnya adalah hakim dengan dikeluarkannya putusan ataupun penetapan atas permohonan tersebut. Bagi hakim, dalam mengadili suatu permohonan terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya, bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya. Oleh karena itu di dalam penetapan atau putusan hakim, yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang obyektif atau tidak. Selain itu, pertimbangan hakim adalah penting dalam pembuatan memori banding dan memori kasasi.

Penetapan pengadilan harus memuat alasan-alasan penetapan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004). Alasan-alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif, mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya. namun berdasarkan fakta persidangan dan pengakuan saksi-saksi khususnya saksi a de charger dimana pasal yang didakwakan memuat unsur subjektif yaitu setiap orang, namun fakta antara apa yang didakwakan unsur setiap orang (terdakwa) tidak memiliki hubungan dari pengembangan atas kasus narkoba, sehingga atas keterangan tersebut majelis berkesimpulan bahwa unsur setiap orang pada pasal yang didakwakan tidak terbukti, oleh sebab itu sudah sepatutnya terdakwa dibebaskan dari dakwaan, mengingat ketentuan pasal 191 KUHP ayat (1) dan ketentuan Hukum lainnya yang saling berkaitan.

Guna dapat mempertanggungjawabkan penetapan, sering juga dicari dukungan pada yurisprudensi dan ilmu pengetahuan. Artinya bahwa hakim tidak terikat pada atau harus mengikuti putusan perkara yang sejenis yang pernah dijatuhkan. Ilmu pengetahuan memiliki kewibawaan karena didukung oleh para pengikutnya serta sifat obyektif. Oleh karena itu hakim harus berani dalam menemukan hukumnya, tetapi dengan argumentasi yang logis yuridis dan bertanggung jawab.

3.2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Putusan Bebas

a) *Tidak Terpenuhinya Asas Pembuktian*

Tidak terbuktinya asas pembuktian dalam persidangan berarti putusan dalam perkara tersebut "*batal demi hukum*". Hal yang mengakibatkan putusan batal demi hukum dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat yang harus dimuat dalam sebuah putusan hakim, hal ini diatur dalam Pasal 197 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHP). Putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang lupa mencantumkan salah satu dari ketentuan yang ada pada pasal tersebut, berarti putusan dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap terdakwa serta jaksa tidak dapat melaksanakannya.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Agus Rusianto, sebelum memutuskan suatu perkara, hakim selalu memperhatikan hal-hal yang dapat menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis maupun di luar ketentuan-ketentuan yuridis demi menemukan suatu kebenaran dan menciptakan keadilan. Atas putusan Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN Mks terkait tuntutan yang didakwakan itu tidak memenuhi unsur subjektif sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum.

Pidana hanya dapat dijatuhkan bila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan, yaitu kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum. Jadi pengadilan menjatuhkan pidana apabila terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya. Bukan begitu saja dapat dijatuhi pidana tetapi, harus didukung dengan alat bukti yang sah sesuai dengan rumusan Pasal 183 KUHP. Disamping itu yang patut diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Rusianto, yaitu :

- (1) Kesalahan pembuat tindak pidana.
- (2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
- (3) Cara melakukan tindak pidana.
- (4) Sikap batin pembuat pidana.
- (5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana.
- (6) Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
- (7) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
- (8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- (9) Tanggung jawab pelaku terhadap korban.
- (10) Apakah tindak pidana dilakukan dengan rencana.

b) *Kesalahan dan Keyakinan Tidak Terbukti*

Pasal 183 Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) selengkapnya berbunyi : "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya*".

Dari bunyi Pasal 183 KUHP di atas, dapat dipahami bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus : (1) Kesalahannya terbukti sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah", dan; (2) Atas keterbuktian minimal dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan benar terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Jadi apabila semua alat bukti yang diajukan dipersidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Atau secara

nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian.

- (1) Ketidakmampuan Bertanggung Jawab, dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :
- (2) Alasan pembeda, berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembeda dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan 'pencabutan nyawa' yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati (Pasal 50 KUHP);
- (3) Alasan pemaaf, adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 KUHP).

Mengenai alasan pemaaf dapat dilihat dari bunyi Pasal 44 ayat (1) KUHP : *“Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.”*

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun. Sebelum putusan ini, menurut UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak yang berusia 8 hingga 18 tahun dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Penetapan usia minimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik di berbagai negara. Batasan usia 12 tahun ini telah sesuai ketentuan pidana anak dalam Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU Pengadilan Anak. Berbeda dengan proses hukum untuk orang dewasa, anak yang melakukan tindak pidana akan melalui proses yang dinamakan dengan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak tersebut dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi wajib diupayakan apabila anak tersebut melakukan tindak pidana yang pidana penjaranya kurang dari 7 (tujuh) tahun, misalnya pencurian. Jika tidak terjadi kesepakatan dalam diversi atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan. Meskipun peradilan dilanjutkan, hukuman yang diberikan kepada anak tentu saja harus memperhatikan kepentingan anak tersebut dan mengutamakan keadilan restoratif.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai penjatuan putusan bebas terhadap tindak pidana narkoba diatur secara terpisah, dimana pengaturan mengenai penjatuan putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP. Sedangkan pengaturan hukum terhadap tindak pidana narkoba sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba. Faktor penyebab terjadinya putusan bebas adalah tidak memenuhi asas pembuktian

menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rusianto (2019 Desember 20) Hakim Dalam Memutus Perkara (Andi Ilham Anwar, Pewawancara)
- Darwis. (2019 Desember 20). Mengadili dan Mencermati Fakta Persidangan. (Andi Ilham Anwar, Pewawancara)
- Dwi Yanni Lukitaningsih, Narkoba, Pencegahan dan Penanganannya. (Jakarta: PT. Elex Mecjia Komputindo, Kelompok Gramedia, 2001).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1434/Pid.Sus/2018/PN Mks
- Sabungan Sibarani. 2014. Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Oleh Mahkamah Agung (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 417 K/Pid.Sus/2011. Yure Humano. Juli/Desember Vol.5 Tahun 2014 ISSN: 0216-7646
- Taufik Makarao, Muhammad, dkk. 2003, *Tindak pidana narkoba*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman